KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Kenaikan Anggaran DPR Berlebihan
Tanggal : Selasa, 15 Agustus 2017
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 3

Kenaikan Anggaran DPR Berlebihan

Publik tidak punya alasan untuk mendukung rencana DPR karena mereka gagal membuktikan layak untuk mendapat fasilitas baru.

CHRISTIAN DIOR S
dior@mediaindonesia.com



MI/SUSANTO

PEMBANGUNAN GEDUNG BARU DPR: Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Rakyat (Lima) Ray Rangkuti (tengah) didampingi peneliti Formappi Lucius Karus (kiri) dan Direktur Indonesia Budget Center (IBC) Roy Salam berbicara dalam diskusi publik terkait dengan usulan pembangunan gedung baru dan apartemen anggota DPR di Jakarta, kemarin. Mereka menilai usulan proyek yang diperkirakan memakan anggaran Rp5,7 triliun itu belum sejalan dengan kinerja DPR yang diharapkan rakyat dan belum ada urgensinya.

DPR kembali menggulirkan wacana membangun gedung baru dan apartemen bagi anggota DPR seiring naiknya pagu anggaran DPR untuk tahun anggaran 2018 menjadi Rp5,7 triliun dari Rp4,3 triliun pada 2017. Bahkan, Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR mengusulkan agar anggaran DPR naik hingga Rp7,2 triliun.

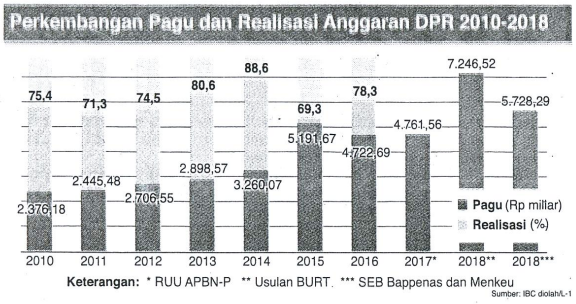
Menurut peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus, DPR seolah tidak sadar diri mengusulkan kenaikan anggaran sebesar itu. Terlebih, kinerja DPR periode 2014-2019, khususnya di bidang legislasi, terbilang buruk.

"Kinerja mereka tidak pernah berubah. Malah semakin menurun. Publik tidak punya alasan untuk mendukung rencana DPR karena mereka gagal membuktikan bahwa mereka memang layak untuk mendapatkan fasilitas baru," ujar Lucius dalam diskusi di D'Hotel, Jakarta, kemarin.

Menurut catatan Formappi, sejak mulai berkantor pada 2014, DPR periode 2014-2019 baru baru mengesahkan 16 rancangan undang-undang (RUU) menjadi UU. Tahun ini DPR baru mengesahkan 4 UU dari target Prolegnas 2017 sebanyak 40 RUU. Padahal, selama tiga tahun bekerja, DPR periode sebelumnya telah mengesahkan sekitar 30 UU.

"DPR periode ini bisa dibilang paling buruk sepanjang sejarah. Makanya bangun gedung baru itu tidak perlu jadi perhatian DPR. Seharusnya DPR fokus membenahi kinerja dan citra di mata publik. Kalau kinerja masih buruk, tidak mungkin publik menyetujui penambahan fasilitas," cetusnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengungkapkan urgensi pembangunan gedung baru DPR. Menurut dia, Gedung Nusantara I DPR yang saat ini digunakan sebagai ruang fraksi dan ruang kerja anggota dewan sudah tidak layak lagi.



Lebih dari cukup

Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti mengatakan belum saatnya DPR memikirkan penambahan fasilitas. Pasalnya, fasilitas yang dimiliki anggota DPR sudah jauh dari mencukupi.

"Fasilitas itu terus diberikan sejak DPR periode lalu, mulai minta meja, karpet, laptop, LCD di setiap ruangan, kemudian staf ahli dan mobil dinas. Sekarang minta lagi gedung baru. Kalau kita lihat, ini malah trennya terbalik. Justru ketika makin lemah kinerja, semakin besar fasilitas yang diminta," jelasnya.

Direktur Indonesia Budget Center (IBC) Roy Salam meminta negara untuk tidak menyetujui kenaikan anggaran DPR seperti yang diusulkan BURT. Menurut dia, kenaikan anggaran seharusnya sesuai dengan kemampuan dan kinerja anggota DPR. Terlebih, saat ini negara juga tengah defisit.

Rencana kenaikan anggaran DPR juga dikritisi mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD. Melalui akun *Twitter*-nya, *@mohmafudmd*, Mahfud menyebut pimpinan DPR yang mengatakan gedung DPR sudah miring tidak waras.

"Hasil penelitian PU, gedung DPR tidak miring. Yang bilang miring itulah yang miring. Meski kita tak setuju pembangunan gedung DPR dan mual pada tingkah DPR, saya tak setuju DPR dibubarkan. Lebih baik ada DPR yang jelek daripada tidak ada," kicau Mahfud di *Twitter*. (P-2)